



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PPH-133.OT.03 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671)

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.OT.03.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-388.OT.03 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas:
    1. memberikan arahan dan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - c. Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas sebagai berikut:
    1. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan bahan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    2. menyampaikan konsep laporan untuk dimintakan persetujuan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan bahan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. mengumpulkan dan menyusun bahan/laporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Pokja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-013.11.1-635549/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SRI PUGUH BUDI UTAMI  
NIP 196207021987032001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : PPH-133.OT.03 Tahun 2021  
Tanggal : 26 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
4. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sekretaris : Evy Setyowati Handayani, S.H., M.H.  
Sekretariat : 1. Dwi Kartikawati, S.E.  
2. Sutan Hardiansyah, S.E.  
3. Maria Erfina Oktaviani, S.I.P.  
4. Shafira Elnanda Yasmine, S.Hub.Int.  
5. Sigid Suryanto, S.I.P.

**Manajemen Perubahan**

Koordinator : Bintang Meini Tambunan, S.E., M.M., M.Si.  
Wakil Koordinator : Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Sujatmiko, S.H., M.Si.  
Anggota : 1. Oktaviana, S.H., M.H.  
2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.  
3. Intan Puspa Sari, S.I.P.  
4. Siswanto Budi Nugroho, S.I.P.  
5. Nadia Dwi Rahma, S.H.  
6. Dewi Analis Indriyani, S.H.  
7. Tri Lestari, S.I.P.  
8. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.

**Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Koordinator : Harison Citrawan, S.H., LL.M.  
Wakil Koordinator : Edy Sumarsono, S.H., M.H.  
Sekretaris : Sabrina Nadilla, S.H.  
Anggota : 1. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.  
2. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si.  
3. Insan Firdaus, S.H.

4. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
5. Junaidi Abdillah, S.Sos.
6. Amin Salasa, S.I.P.
7. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.

### **Penataan dan Penguatan Organisasi**

Koordinator	: Adi Ashari, S.H., M.H.
Wakil Koordinator	: Maryati, S.Pd., M.SI.
Sekretaris	: Shafira Elnanda Yasmine, S.Hub.Int.
Anggota	: 1. Citra Krisnawaty, S.H., M.H. 2. Niar Sirait, S.I.P. 3. Mira Sukmawati, S.I.P. 4. Atikah Rahmah, A.Md.

### **Penataan Tata Laksana**

Koordinator	: Ruliana Pendah Harsiwi, S.H., M.H.
Wakil Koordinator	: Daryono, S.H.
Sekretaris	: Dwi Kartikawati, S.E.
Anggota	: 1. Agus Priyatna, A.Md., S.Kom. 2. Aisyah Rahman, S.H. 3. Rizki Bagus Prasetio, S.H. 4. Natalia Imas Kristi Nugraheni, S.I.P. 5. Berlon Suryadi, S.H. 6. Nova Mustika 7. Rodes Ober Adi Guna Pardosi, S.H. 8. Ana Maria Septiana, A.Md.

### **Penataan Sistem Manajemen SDM**

Koordinator	: Dra. Novia Swastika
Wakil Koordinator	: Kesy Warsiningsih, S.H., M.H.
Sekretaris	: 1. Emmy Taurina Adriani, S.H. 2. Andi Fajar Munggaran, S.H.
Anggota	: 1. Fathullah, S.Sos. 2. Putikha, S.H., M.H. 3. Fadillah Said, S.Kom., MTCNA. 4. Asri Setiapuri, S.H., M.H. 5. Desak Ketut Indraswari, S.I.P. 6. Hardiyanto, S.I.P. 7. Tri Oktober Sinaga, S.H. 8. Nadiah, S.H.

### **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Koordinator	: Indah Kurnianingsih, S.H.
Wakil Koordinator	: Evy Setyowati Handayani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Anggraini Retno Mustika Bella, S.Sos.

- Anggota : 1. Sutan Hardiansyah, S.E.  
2. Leny Triswirly, S.H.  
3. Novie Evlina, S.E  
4. Mutia Yustika, S.Sos.  
5. Windi Kumoratih Kusumo Putri, S.E.  
6. Maria Erfina Oktaviani, S.I.P.  
7. Sigid Suryanto, S.I.P.  
8. Anton Himawan, A.Md.

### **Penguatan Pengawasan**

- Koordinator : Arief Dwi Meiwanto, S.H., M.H.  
Wakil Koordinator : Cut Azanita, S.H., M.H.  
Sekretaris : 1. Yuditia Nurimaniar, S.H.,M.Si.  
: 2. Diana Indah Sari, S.H  
Anggota 1. Endah Kartina, S.Psi., M.Si.  
2. Tri Wantustri, S.H.  
3. Dadang Ismail, S.Kom.  
4. Sri Winarsih, S.H.  
5. Ikha Sapta Ningroem, A.Md., S.H.  
6. Tutut Apriyani, S.Ak.  
7. Ahmad Zulfikar, A.Md.  
8. Dian Amelia, A.Md

### **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- Koordinator : Fitriyani, S.H., M.Si.  
Wakil Koordinator : Drs. Halasan Pardede  
Sekretaris : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.  
Anggota : 1. Machyudhie, S.T.  
2. Anita Marianne, S.H., M.H.  
3. Eldes Natalya Hutagalung, S.E.  
4. Lindung Budi Mulyawan, S.H  
5. Ibnu Prasetyo, S.H.  
6. Mochamad Arip, S.Kom.  
7. Dade Zulaecha, A.Md.  
8. Miftah Ardhian, S.I.P.  
9. Harysandy Permana, S.Kom.  
10. Winda Astuti, S.H.  
11. Chintia Octenta, S.Sos.  
12. Jody Imam Rafsanjani, S.H.  
13. Ellen Lutya Putri Nugrahani, S.H.  
14. Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.  
15. Adi Octaviantara, A.Md.

## Manajemen Media

Koordinator	: Ernie Nurheyanti M. Toelle, S.H., M.H.
Wakil Koordinator	: Saefullah, S.S.T., M.Si.
Sekretaris	: Clarissa Nadya Arina, S.H,
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ulya Fajri Amriyeny, S.H.</li><li>2. Destry Indra Wibawa, S.I.P.</li><li>3. Nurangga Firmanditya, S.H.</li><li>4. Farah Annisa Harahap, S.I.P.</li><li>5. Tomy Erwanto, S.H.</li><li>6. Faris Hasan Fauzi, S.H.</li><li>7. Fransisca Puspitaning Ari, S.I.Kom.</li></ol>



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Pugh Budi Utami', positioned above the printed name and NIP.

SRI PUGUH BUDI UTAMI  
NIP 196207021987032001